GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 100.3.2/166/RO.HUKUM-G.ST/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 100.3.2/594/RO.HUKUM-G.ST/2024 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Penyesuaian tarif dan rincian objek retribusi daerah maka Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.3.2/594/RO.HUKUM-G.ST/2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2025 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.2/594/RO.HUKUM-G.ST/2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.2/594/RO.HUKUM-G.ST/2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Perangkat Daerah Pengusul menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Gubernur dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat untuk dilakukan pengharmonisasian tanggal 30 September 2025.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 9 Juli 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 100.3.2/166/RO.HUKUM-G.ST/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 100.3.2/594/RO.HUKUM-G.ST/2024 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

No	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pemrakarsa
			Baru	Ubah		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.	- Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.		Ubah	TW I	BPKAD
2.	Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Sulawesi Tengah	- Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Baru		TW I	BPKAD
3.	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	- Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah		Ubah	TW I	BPKAD

4.	Tata Cara Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kab/Kota	- Tata Cara Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kab/Kota	Baru		TW I	BAPENDA
5.	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg	Lampiran Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas		Ubah	TW I	BIRO PEREKONOMIAN
6.	Perubahan Atas Pergub Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 41 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan PNS pada Instansi Perangkat daerah Provinsi sulawesi Tengah	- Nilai dan Kelas Jabatan PNS pada Instansi Perangkat daerah Provinsi sulawesi Tengah		Ubah	TW I	BIRO ORGANISASI
7.	Pembangunan SDM Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Melalui Program Petani Milineal Provinsi Sulteng	- Pembangunan SDM Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Melalui Program Petani Milineal Provinsi Sulteng	Baru		TW I	BAPPEDA
8.	Pedoman Umum Pelaksanaan Inovasi Terminal dan Trnsportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	- Pedoman Umum Pelaksanaan Inovasi Terminal dan Trnsportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	Baru		TW I	BAPPEDA
9.	Pengelolaan sistem Pembelajaran Pengembangan kompetensi Secara terintegrasi (Corporate University)	- Struktur Organisasi - Pola Kerjanya disesuaikan dengan Manajemen talenta - 8 aspek pengembangan kompetensi	Baru		TW I	BPSDM

10.	Konservasi energi	- Tujuan dan sasaran konservasi energi - Pelaksanaan konservasi energi - Pengelolaan data dan monitoring penggunaan energi - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi	Baru		TW I	ESDM
11.	Tata Kelola Penerbitan surat rekomendasi perizinan berusaha berbasis resiko bidang transportasi dishub sulteng	- Tata Kelola Penerbitan surat rekomendasi perizinan berusaha berbasis resiko bidang transportasi dishub sulteng	Baru		TW I	Dinas Perhubungan
12.	Rencana Aksi Keselamatan LLAJ	- Rencana Aksi Keselamatan LLAJ	Baru		TW I	Dinas Perhubungan
13.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah	- Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah		Ubah	TW II	DP3A
14.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Baru		TW II	DP3A
15.	Mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran	- Mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran	Baru		TW II	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

16.	Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan persetujuan pemungutan hasil hutan bukan kayu diluar Kawasan hutan dan permohonan penilaian dan pemberian penurunan kapasitas izin produksi dibawah 6000 m3/thn.	- Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan kayu di Luar Kawasan Hutan	Baru		TW II	DINAS KEHUTANAN
17.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan	- Pengarustamaan kebudayaan daerah - Pokok pokok pikiran kebudayaan daerah - Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah - Perlindungan - Pengembangan - Pemanfaatan - Pembinaan - Peran serta masyarakat - Penganggaran	Baru		TW II	DINAS KEBUDAYAAN
18.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Stunting	- Sasaran aksi konvergensi - Pendekatan - Edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi - Kajian dan analisis	Baru		TW II	DINAS KESEHATAN
19.	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	- Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Baru		TW II	DINAS KESEHATAN

20.	Pembentukan, Tugas, Tata Kerja serta Pembiayaan Operasional KPAP	- Pembentukan, Tugas, Tata Kerja serta Pembiayaan Operasional KPAP	Baru		TW II	DINAS KESEHATAN
21.	Pola tata Kelola, Renstra dan SPM	- Pola tata Kelola, Renstra dan SPM	Baru		TW II	Dinas Kesehatan (madani)
22.	Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik dan Non Fisik	- Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik dan Non Fisik	Baru		TW II	BPKAD
23.	Tata Cara Penerbitan NPWPD	- Tata Cara Penerbitan NPWPD	Baru		TW II	BAPENDA
24.	Rencana Induk sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulteng	- Pedoman Pelaksanaan SPAM Provinsi	Baru		TW II	DINAS CIKASDA
25.	Rencana Induk Sistem Persampahan Provinsi Sulawesi Tengah	- Pedoman Pelaksanaan Persampahan Provinsi	Baru		TW II	DINAS CIKASDA
26.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	- Tata Cara Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		Ubah	TW II	DISPANGAN DAN HORTIKULTURA
27.	Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah	- Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Baru		TW II	DISPANGAN DAN HORTIKULTURA
28.	Registrasi Lahan/Kebun Tanaman Pangan dan Holtikultura	- Tata Cara Registrasi Lahan/Kebun Tanaman Pangan dan Hortikultura	Baru		TW II	DISPANGAN DAN HORTIKULTURA

29.	Perubahan atas Pergub Nomor 34 Tahun 2023 tentang pembentukan Kedudukan SOTK, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Pendidikan Formal	- pembentukan Kedudukan SOTK, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Pendidikan Formal		Ubah	TW II	BIRO ORGANISASI
30.	Perubahan atas Pergub Nomor 12 Tahun 2024 tentang RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	- RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025		Ubah	TW II	BAPPEDA
31.	Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026	- Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026	Baru		TW II	BAPPEDA
32.	Energi Bersih	- Pengembangan Energi daerah yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan - Pemenuhan kebutuhan energi daerah dengan menggunakan energi bersih - Peran energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah - Pengelolaan energi bersih disulawesi tengah	Baru		TW II	ESDM
33.	Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah provinsi sulawesi tengah	- Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi	Baru		TW II	BRIDA
34.	Pelaksanaan Perda Provinsi sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah	- Penyelenggaraan Pendidikan Daerah	Baru		TW II	Dinas Pendidikan

35.	Pelaksanaan Uji Emisi	- Pelaksanaan Uji Emisi	Baru		TW II	Dinas Perhubungan
36.	Tatanan transportasi wilayah (Tatrawil) Tahun 2025	- Tatanan transportasi wilayah (Tatrawil)	Baru		TW II	Dinas Perhubungan
37.	Pengawasan dan Peredaran Bahan Asal hewan dan Pangan Olahan	- Pengawasan peredaran jumlah permintaan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran pangan asal hewan dari dan ke wilayah sulteng - Pengawasan teerhadap mewabahnya beberapa penyakit pada hewan menular yang dapat mengakibatkan - foodborne disease - Sesuai dengan permen pertanian nomor 11 tahun 2020 melakukan pengawasan peredaran bahan asal hewan dan pangan olahan yang memenuhi prinsip ASUH	Baru		TW II	Dinas Perkebunan dan Peternakan (UPT Veteriner)
38.	Tata Cara Pengadaan yang Dibiayai Oleh APBD	- Sengketa Pengadaan - Antisipasi Kontrak Akhir Tahun - Legalitas Formal Pelaku Pengadaan	Baru		TW III	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

39.	Pelayanan Publik	- Pelayanan Publik	Baru		TW III	BIRO ORGANISASI
40.	Peraturan Gubernur tentang Kelembagaan BLUD Kawasan Pangan Nusantara Dampelas Sulawesi Tengah	- BLUD KPN Dampelas memuat tentang tata cara Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan dalam pengelolaan di Kawasan KPN Dampelas	Baru		TW III	BAPPEDA
41.	Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	- Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	Baru		TW III	INSPEKTORAT
42.	Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	- Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Baru		TW III	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
43.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- Tugas Pembantuan - Tata cara pemberian penilaian, bentuk dan kriteria penilaian penghargaan - Bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif hasil	Baru		TW III	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

		pengawasan pengelolaan keuangan desa - Isi dan bentuk laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa				
44.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	- Perubahan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial		Ubah	TW III	BPKAD
45.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	- Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	Baru		TW III	BPKAD
46.	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan	- Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan	Baru		TW III	BPKAD
47.	Pengelolaan Belanja Tidak Terduga	- Pengelolaan Belanja Tidak Terduga	Baru		TW III	BPKAD

48.	Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP)	- Nilai Perolehan Air Permukaan	Baru		TW III	BAPENDA
49.	Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	- Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	Baru		TW III	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
50.	Petunjuk pelaksanaan perda Nomor 6 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi - Penetapan Kebijakan Khusus - Penggunaan Produk dalam Negeri - Pembinaan Penerapan SMKKK Sesuai Lingkup Kewenangannya - Teknik Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Baru		TW III	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
51.	Pola tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah	- Pola tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah	Baru		TW III	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
52.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum Pada Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah	- Rencana strategis badan layanan umum daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah	Baru		TW III	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

53.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum Pada Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah	- Standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah	Baru		TW III	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
54.	Roadmap Sanitasi Provinsi Sulawesi Tengah	- Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Provinsi	Baru		TW III	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
55.	Pola tata Kelola, Renstra dan SPM	- Pola tata Kelola, Renstra dan SPM	Baru		TW III	Dinas Kesehatan (Undata)
56.	Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) tahun 2025-2045	- Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) tahun 2025-2045	Baru		TW III	DPMPTSP
57.	Mekanisme Pengelolaan Subsidi Bidang Transportasi Dishub Sulteng	- Mekanisme Pengelolaan Subsidi Bidang Transportasi Dishub Sulteng	Baru		TW III	Dinas Perhubungan
58.	Kriteria pelayanan dan persyaratan kendaraan angkutan sewa khusus	- Kriteria pelayanan dan persyaratan kendaraan angkutan sewa khusus	Baru		TW III	Dinas Perhubungan
59.	Mekanisme/prosedur izin angkutan barang umum	- Mekanisme/prosedur izin angkutan barang umum	Baru		TW IV	Dinas Perhubungan
60.	Penyusunan Rencana induk, rencana pembangunan dan pengembangan perkeretaapian	- Penyusunan Rencana induk, rencana pembangunan dan pengembangan perkeretaapian	Baru		TW IV	Dinas Perhubungan

61.	Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan pangan Pemerintah Provinsi	- pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah - pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah - mekanisme penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah - Tata Cara Pengenaan Sanksi Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan - tata cara pelaksanaan pengawasan dan pelaporan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Baru		TW IV	DINAS PANGAN
62.	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kenderaan Bermotor Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025	- Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kenderaan Bermotor Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor dan Pajak Alat Berat	Baru		TW IV	BAPENDA
63.	Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup	- tata cara pelaksanaan inventarisasi data Jasa Lingkungan - Tata cara Pemberian Fasilitasi penyelenggaraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup	Baru		TW IV	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

		- tata cara penentuan nilai Jasa Lingkungan Hidup - tata cara peran masyarakat dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup				
64.	RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	- RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	Baru		TW IV	BAPPEDA
65.	RAD Lanjut Usia	- RAD Lanjut Usia	Baru		TW IV	BAPPEDA
66.	RAD Pelayanan Kepemudaan	- RAD Pelayanan Kepemudaan	Baru		TW IV	BAPPEDA
67.	Desain Olahraga Daerah	- Desain Olahraga Daerah	Baru		TW IV	BAPPEDA
68.	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029	- Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029	Baru		TW IV	BAPPEDA
69.	Petunjuk pelaksaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan	- Petunjuk pelaksaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan	Baru		TW IV	DINAS KESEHATAN

70.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	- Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Baru		TW II	BAPPEDA
71.	Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil	- Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil	Baru		TW I	BKD
72.	Penyelenggaraan program jaminan Kesehatan daerah	- program jaminan Kesehatan daerah	Baru		TW II	DINAS KESEHATAN
73.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	- Pedoman Tata Naskah Dinas		Ubah	TW II	BIRO ORGANISASI
74.	Tata Cara Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan	- Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan	Baru		TW II	DINAS PENDIDIKAN
75.	Desain Olahraga Daerah Tahun 2021-2045	- Desain Olahraga Daerah Tahun 2021-2045	Baru		TW II	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
76.	Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2030	- Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2030	Baru		TW II	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
77.	Pelaksanaan Kepemudaan dan Keolahragaan	- Pelaksanaan Kepemudaan dan Keolahragaan	Baru		TW II	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

78.	Pedoman Umum Pelaksanaan Program Berani Berdering Tahun 2025-2030	- Berani Berdering Tahun 2025-2030	Baru		TW II	DISKOMINFO
79.	Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	- Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	Baru		TW II	DINAS PERKEBUNAN dan PETERNAKAN
80.	Perubahan atas Peraturan gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	-		Ubah	TW II	DINAS PENDIDIKAN
81.	Penyelenggaraan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih	- Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih	Baru		TW II	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
82.	Perubahan atas penyesuaian tarif dan rincian objek retribusi daerah hasil peninjauan	- penyesuaian tarif dan rincian objek retribusi daerah hasil peninjauan	Baru		TW II	BADAN PENDAPATAN DAERAH
83.	Pembentukan, Tugas, Tata Kerja Serta Pembiayaan Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi	- Pembentukan, Tugas, Tata Kerja Serta Pembiayaan Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi	Baru		TW III	DINAS KESEHATAN
84.	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Sewa Kendaraan	- Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Sewa Kendaraan	Baru		TW III	BPKAD

85.	Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	- Perubahan Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah		Ubah	TW III	BIRO ORGANISASI
86.	Strategi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak	- Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak	Baru		TW III	DP3A
87.	Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan pembayaran/penyetoran Iuran Pertambangan Rakyat serta mekanisme penggunaan Iuran Pertambangan Rakyat.	- Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan pembayaran/penyetoran Iuran Pertambangan Rakyat serta mekanisme penggunaan Iuran Pertambangan Rakyat.	Baru		TW III	ESDM
88.	Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Provinsi Sulawesi Tengah.	- Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Provinsi Sulawesi Tengah.	Baru		TW III	ESDM

89.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu bara	- Rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara		Ubah	TW III	ESDM
90.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Daerah Penyelenggaraan Wajib Belajar 13 Tahun di Sulawesi Tengah	- Kebijakan Daerah Penyelenggaraan Wajib Belajar 13 Tahun di Sulawesi Tengah	Baru		TW III	DINAS PENDIDIKAN
91.	Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2025-2029	- Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2025-2029	Baru		TW IV	DP3A
92.	Rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terrorisme (RAD PE) tahun 2025	- pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terrorisme	Baru		TW III	KESBANGPOL

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ANWAR HAFID